

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, pendidikan adalah suatu proses dimana cara berpikir, perilaku, budi pekerti, bahasa dan juga partisipasi dalam kehidupan sosial seseorang ditentukan berdasarkan pendidikannya (Safitri, Yuniarti, and Rostika, 2022). Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.

Menurut Dedy Mulyasana (2015), Pendidikan yang berkualitas mengacu pada pendidikan yang memungkinkan peserta didik terbebas dari kebodohan, ketidakmampuan, kemunafikan, ketidakjujuran, korupsi moral dan itikad buruk, serta dapat mewujudkan proses pendewasaan kualitas peserta didik. Selaras dengan penelitian (Safitri et al., 2022), mengingat pentingnya peran pendidikan bagi seseorang maupun kelompok untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), karena dapat sepenuhnya mempengaruhi pertumbuhan bangsa dan negara, tidak hanya mempengaruhi produktivitas tetapi juga mempengaruhi fasilitas dalam masyarakat.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Untuk menyelesaikan tugas, mengurangi ketidaksetaraan, dan melindungi lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomer 111 Tahun 2022 tujuan *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan global untuk tahun 2016-2030. Konsep *Sustainable Development Goals* merupakan hasil kegiatan konferensi di *Rio de Janeiro* yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012 terkait dengan *Sustainable Development Goals*. Konferensi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama yaitu mampu menjaga keseimbangan tiga hal utama dalam *Sustainable Development Goals* yang meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi (Arief Anshory Yusuf et al., 2018).

Sustainable Development Goals (SDGs) didesain sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai hingga akhir tahun 2015. Tujuannya adalah untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang meluas, selain mengatasi kemiskinan ekstrem, tantangan global terbesar, dan kondisi yang tidak berkelanjutan untuk *Sustainable Development Goals* (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015).

Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia telah memasuki tahun keenam pasca ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 yang kini diperbaharui dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan *Sustainable Development Goal*. Salah satu amanat Perpres tersebut adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN)

2021-2024 dan pelaporannya. Laporan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2021 ini merupakan laporan evaluasi pelaksanaan tahun pertama dari RAN TPB/SDGs periode 2021–2024 (Bappenas, 2021).

Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas sepanjang hayat untuk semua. SDGs ini menekankan pentingnya pendidikan yang memberdayakan, mendukung perkembangan keterampilan, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas pendidikan, penghapusan disparitas gender di dalamnya, dan peningkatan kualitas pembelajaran, SDGs ke-4 berkomitmen untuk memberikan peluang pendidikan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi mereka.

Upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* merupakan tujuan utama pembangunan nasional serta memerlukan keterpaduan kebijakan perencanaan pada taraf nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. *Sustainable Development Goals* pada taraf nasional diselaraskan menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024 dalam hal *planning*, aktivitas terukur serta indikator dukungan finansial. Sedangkan di Kabupaten Bekasi pelaksanaan *Sustainable Development Goals* sudah selaras dengan RPJMD 2017-2022 diantaranya program kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, serta industri inovasi dan infrastruktur (Enriko, 2018).

Tabel 1.1 *Scorecard* Pencapaian Indikator SDGs Ke-4 Provinsi Jawa Barat

Target	Indikator	Skor	Klas	Kategori
4.1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	2	C	Masih seperempat jalan lagi menuju target SDGs
4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi (%)	3	B	Mendekati target SDGs
4.6	Angka melek huruf usia 15-24 (%)	4	A	Mencapai atau hampir mencapai target SDGs

Sumber: (Arief Anshory Yusuf et al. 2017)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat *Scorecard* Pencapaian Indikator SDGs Ke-4 Provinsi Jawa Barat. Indikator-indikator untuk masalah pendidikan yang berkualitas seperti angka melek huruf dan angka partisipasi kasar perguruan tinggi diproyeksikan memiliki progres yang baik dan positif dan sangat mungkin mencapai targetnya di tahun 2030. Hanya indikator rata-rata lama sekolah yang memiliki progress yang tidak cukup tinggi dengan mendapatkan skor C untuk pencapaian SDGs 2030. Namun skor inipun masih menunjukkan tren yang positif dari indikator tersebut (Anshory Yusuf et al., 20y18).

Indeks Pendidikan yang dirilis oleh (*Human Development Report, 2017*) Indonesia berada di posisi ketujuh di ASEAN dengan nilai 0,622. Nilai tertinggi Singapura adalah 0,832. Malaysia di urutan kedua (0,719) dan Brunei Darussalam (0,704). Di urutan keempat ada Thailand dan Filipina yang sama-sama memiliki nilai 0,661.

Tabel 1.2 Human Development Indeks

HDI rank	Negara	Human Development Index (HDI)	Perkiraan tahun sekolah	Pendapatan nasional (GNI) per kapita	Peringkat GNI per kapita dikurangi peringkat HDI	HDI rank
		Value	(years)	(2017 PPP \$)		
		2021	2021	2021	2021	2020
19	Korea	0,925	16,5	44.501	9	20
12	Singapore	0,939	16,5	90.919	-10	10
19	Japan	0,925	15,2	42.274	12	19
132	India	0,633	11,9	6.590	-6	130
79	China	0,768	14,2	17.504	-8	82
62	Malaysia	0,803	13,3	26.658	-8	61
4	Hongkong	0,952	17,3	62.607	6	4
116	Philippines	0,699	13,1	8.920	-3	113
66	Thailand	0,800	15,9	17.030	6	64
115	Viet Nam	0,703	13,0	7.867	6	113
114	Indonesia	0,705	13,7	11.466	-11	116

Sumber: *Human Development Report*

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-116 dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI), mencerminkan sejumlah indikator yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan peringkat menjadi ke-114. Peningkatan peringkat HDI ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pembangunan di Indonesia, baik dalam sektor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi

Dalam rangka memajukan bangsa dan budaya nasional, pendidikan nasional diharapkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat negara Indonesia guna memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerataan pada pendidikan meliputi dua aspek penting yaitu pemerataan, pemerataan yang

berarti pemerataan kesempatan pendidikan, serta pemerataan yang berarti keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara perkumpulan rakyat yg tidak selaras (Yuliani, 2016). Selain itu, akses yang sama terhadap pendidikan berarti bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dasar. Hal ini kemudian menyelaraskan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan hak rakyat atas pendidikan, pada hal ini kesempatan serta akses yg sama terhadap pendidikan, salah satu program tujuan *Sustainable Development Goals* pada pendidikan berkualitas adalah “Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif”.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pemerintah dan pemerintah daerah memastikan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negara dari usia 6 tahun dapat berpartisipasi dalam kesempatan belajar. Kemudian, dalam PP No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun, pemerintah menyatakan bahwa pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dilaksanakan tanpa pungut biaya.

Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun menuntut kinerja yang maksimal untuk memastikan semua anak usia 7-18 tahun dapat bersekolah serta menuntaskan pendidikan 12 tahun. Problem pendidikan pada taraf menengah yaitu, masih ada sekitar 2,0 juta. Berasal 12 juta anak usia antara 16 dan 18 tahun, sekitar 2,0 juta bermasalah dengan pendidikan menengah, kurang lebih 2,0 juta tidak menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar, serta sekitar 100.000 tak

pernah bersekolah. Angka tersebut belum termasuk 1 juta anak yg tamat sekolah tetapi tidak melanjutkan Sekolah Menengah Pertama/MT, maupun 280.000 anak putus sekolah SMA/Sekolah Menengah kejuruan (Bappenas, 2015).

Upaya peningkatan partisipasi pendidikan menengah sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan fasilitas, keterjangkauan fasilitas, keterjangkauan pembiayaan, kualitas pelayanan yg diberikan serta persepsi nilai tambah. Mahalnya biaya pendidikan juga menjadi satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat miskin pada pendidikan menengah. Berikut status partisipasi pendidikan anak usia 6-18 tahun di Indonesia tahun 2012 (Bappenas, 2015).

Tabel 1.3 Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 di Jawa Barat 2021

Wilayah Jawa Barat	Angka Partisipasi Sekolah		
	7 - 12	13 - 15	16 - 18
	2021	2021	2021
Provinsi Jawa Barat	99.50	95.09	67.80

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2021, angka partisipasi sekolah anak-anak dalam rentang usia 7-12 tahun mencapai tingkat yang cukup bagus sebesar 99,50 persen. Hal ini mencerminkan komitmen dan upaya yang dilakukan untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif dan merata pada tahap awal perkembangan anak. Meskipun demikian, pada kelompok usia 13-15 tahun, angka partisipasi sekolah menurun sedikit menjadi 95,09 persen. Faktor-faktor seperti tantangan pendidikan remaja, seperti peran pekerjaan anak atau faktor ekonomi, mungkin memainkan peran dalam penurunan ini. Selain itu, kelompok usia 16-18

tahun mencatatkan angka partisipasi sekolah sebesar 67,80 persen, menunjukkan adanya tantangan yang lebih besar pada tahap ini.

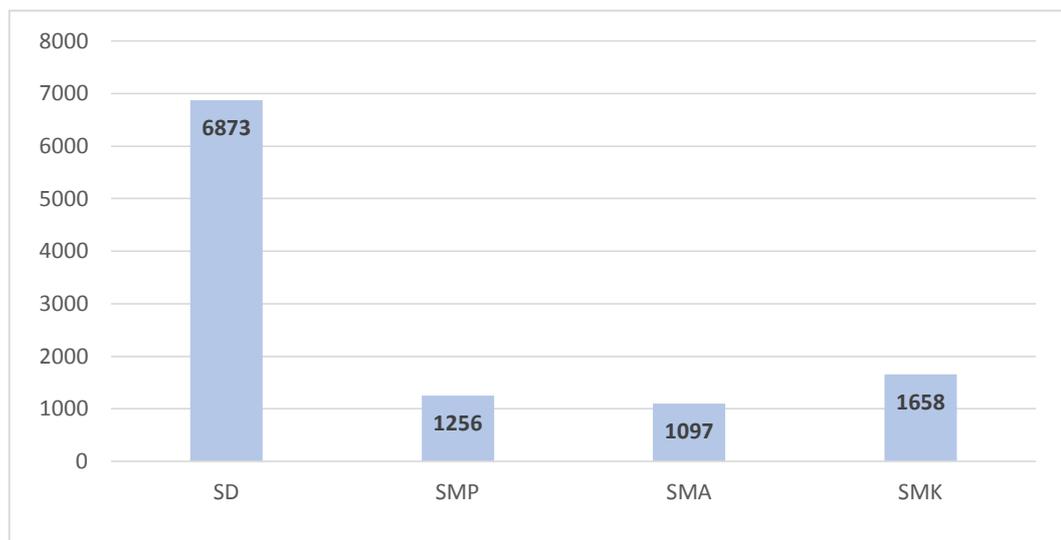
Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahun wajib menghadiri SD. Namun realitanya, sekitar 12 % anak usia 7 sampai 12 tahun dan 10,48 % anak usia 13 hingga 15 tahun tidak bersekolah pada tahun 2012. Beberapa dari mereka bahkan tidak bersekolah. Disparitas partisipasi pendidikan masih relatif signifikan, contohnya antar daerah, antara kota dan desa, antara kaya serta miskin. Misalnya, selisih GSP (Sekolah Menengah Pertama/MTs) penduduk usia 13-15 ialah 81,0 persen untuk 20 % termiskin serta 94,9 % buat 20 % terkaya. Isu ketimpangan semakin tinggi sebab relatif poly anak usia 13-15 tahun dari keluarga miskin yang tidak bersekolah. Terdapat anak yg tamat Sekolah Dasar/MI serta anak yg tamat Sekolah Dasar/MI namun tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama/MT/ sederajat (Agenda Pembangunan Bidang, 2014).

Putus sekolah merupakan penilaian bagi siswa yang tidak dapat menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, yang tidak dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya, seorang anak yang hanya bersekolah di Sekolah Dasar (SD) sampai kelas 5 SD dikatakan putus sekolah. Kalau anak yang berijazah SMA hanya sampai kelas 2 saja, kita bicara putus sekolah, dsb (Ary H. Gunawan, 2000).

Sejalan dengan penelitian Cahyani, Suciptawati, and Sukarsa (2019), faktor-faktor yg mempengaruhi anak putus sekolah dini adalah kurangnya minat dan kemauan buat bersekolah, kurangnya minat mengajar, ketidakmampuan buat

menghadiri kelas, keuangan keluarga, orang tua yg acuh tidak acuh serta lingkungan bermain anak. Akibat analisis faktor memberikan bahwa faktor yg paling berpengaruh keluar asal SMA merupakan kurangnya perhatian orang tua, sedangkan anak di SMA kurang berminat serta tidak mau bersekolah. Berikut data anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, SMA, serta SMK Se-Jawa Barat Tahun 2021/2022.

Gambar 1.1 Data Anak Putus Sekolah di Jawa Barat Tahun 2021-2022



Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan databoks.Katadata.co.id

Berdasarkan gambar 1.2 Pada tahun 2021-2022, jumlah anak yang putus sekolah di Jawa Barat mencapai 9.784 jiwa. Sekolah Dasar menjadi jenjang dengan jumlah paling tinggi, yaitu 6.873 anak, diikuti oleh SMP dengan 1.256 anak, SMA dengan 1.097 anak, dan SMK dengan 1.658 anak.

Tabel 1.4 Data Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi 2020/2021

No	Kecamatan	Anak Putus Sekolah Jenjang			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Serang Baru	8	0	0	0
2	Sukawangi	4	8	0	0
3	Sukakarya	6	0	0	0
4	Cikarang Pusat	2	0	0	0

5	Bojong Mangu	0	0	0	0
6	Cikarang Timur	50	28	32	0
7	Cikarang Selatan	40	4	0	12
8	Cikarang Utara	20	24	0	4
9	Karang Bahagia	8	0	0	0
10	Cikarang Barat	8	0	4	4
11	Tambun Utara	8	28	4	8
12	Tambun Selatan	44	16	8	12
13	Muara Gembong	6	0	0	72
14	Cabang Bungin	2	12	4	4
15	Pebayuran	12	0	0	0
16	Sukatani	4	0	0	0
17	Tabelang	0	4	0	0
18	Tarumajaya	10	8	0	20
19	Babelan	18	8	4	36
20	Cibitung	36	8	0	48
21	Kedung Waringin	22	0	0	24
22	Cibarusah	6	4	4	8
23	Setu	6	20	0	0

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data Dapodik/DISDIK Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.4 terdapat 804 Siswa/siswi mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang putus sekolah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020/2021. Dengan angka paling tinggi berasal dari Kecamatan Cikarang Timur, 50 anak putus sekolah pada jenjang SD, 28 pada SMP, dan 32 pada SMA. Selanjutnya, di Kecamatan Cibitung, 48 anak mengalami putus sekolah pada jenjang SMK. Masih banyak permasalahan pendidikan di Kabupaten Bekasi. Mulai dari bangunan sekolah yang tidak layak pakai, siswa putus sekolah, sarana dan prasarana, anggaran pendidikan, masalah tenaga pengajar dan masih banyak lagi lainnya (Mahmud Amsori, 2022). Untuk meminimalisir hal tersebut, maka dilaksanakan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui beberapa lembaga diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi sebagai lembaga yang memiliki tugas melaksanakan

penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan sesuai dengan PERBUP Kab. Bekasi No 80 Tahun 2020, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sesuai dengan PERBUP Kab. Bekasi No. 80 Tahun 2021.

Adapun target dalam implementasi *Sustainable Development Goals* dalam penelitian ini adalah “Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif”. Dari berbagai permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Sustainable Development Goals* ke-4 di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar di Kabupaten Bekasi (SDGs ke-4 target ke-1)?
3. Bagaimana persepsi guru tentang upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi *Sustainable Development Goals* ke-4 di Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar di Kabupaten Bekasi (SDGs ke-4 target ke-1).
3. Menganalisis persepsi guru tentang upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar di Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian terkait Implementasi *Sustainable Development Goals* Bidang Pendidikan Berkualitas telah banyak dilakukan sebelumnya, namun

peneliti belum menemukan penelitian mengenai “Implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini berfokus mengkaji lebih dalam Implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan referensi penelitian terdahulu (2011-2022).

Rujukan pertama, adalah jurnal yang ditulis oleh Alvira Oktavia Safitri, Vioreza Dwi Yuniarti, dan Deti Rostik pada tahun 2022 yang berjudul “Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)”. Jurnal ini merupakan jurnal BASICEDU, yang memiliki volume 6 menggunakan nomer issue 4, Universitas Pahlawan.

Pendidikan merupakan usaha yang sistematis serta sadar untuk menyebarkan potensi individu, yang memungkinkan setiap orang mempersiapkan kemampuannya agar berfungsi untuk masyarakat. Taraf kualitas negara juga ditentukan oleh peran masyarakat pada pembangunan negara. Mengingat pentingnya peran pendidikan untuk menaikkan sumber daya manusia (SDM) baik individu maupun kelompok sebab dapat sepenuhnya mensugesti pertumbuhan suatu bangsa serta negara, tidak hanya produktivitas namun juga keadaan masyarakatnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui buku, artikel ilmiah dari sumber jurnal yang relevan Sesuai dengan topik penelitian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa

kondisi pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan dan belum merata di berbagai daerah. Strategi untuk mencapai Tujuan *Sustainable Development Goals* untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia termasuk dalam Tujuan 4. Namun di Indonesia, strategi ini baru diterapkan di beberapa provinsi, dan beberapa provinsi belum menerapkan strategi SDGs dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kesulitan pendaftaran, kesenjangan norma, keterampilan dan kualitas guru di daerah terpencil yang sama sekali tidak menggembirakan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang penulis teliti. Relevansi Penelitian ini adalah pada hasil analisis pencapaian dari program SDGs sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia berdasarkan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan hasil yang didapatkan peneliti kondisi Pendidikan di Indonesia memperhatikan.

Rujukan kedua, adalah jurnal yang ditulis oleh Adityo Darmawan Sudagung, Veronica Putri, Joy Evan, Ivan Sasiva, Laras Putri Olifianipada tahun 2019 yang berjudul “Upaya Indonesia Mencapai Target *Sustainable Development Goals* Bidang Pendidikan Di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat (2014-2019)”. Jurnal tersebut memiliki volume 5 dengan nomer issue 1 dan merupakan jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik Fisip UTA 45 Jakarta.

Sejak 2015, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) telah dibagi menjadi Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia sebagai negara berkembang potensial di Asia Tenggara juga beradaptasi dengan situasi ini. Perluasan tujuan pembangunan global pula harus dibarengi menggunakan

komitmen serta tindakan konkret yang lebih besar dari pemerintah Indonesia. Pada Tujuan *Sustainable Development Goals*, prioritas pemerintah Indonesia ialah menaikkan pendapatan sekaligus mengurangi ketimpangan serta memastikan pembangunan ekologis.

Kalimantan Barat memiliki skor *indeks* pembangunan manusia (IPM) 65,88, peringkat ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia. Asumsi ini relatif mengecewakan. Sebab, dibandingkan Kalimantan Timur yang kebetulan terletak di pulau Kalimantan dengan skor 74,59 menempati urutan ketiga provinsi Indonesia dengan tingkat pembangunan manusia tertinggi, pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Berdasarkan para peneliti majalah ini, situasi memprihatinkan yang membagikan ketimpangan pembangunan sektor pendidikan Indonesia dalam kerangka *Millennium Development Goals* serta *Sustainable Development Goals* patut menerima perhatian lebih.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis konsep pembangunan dalam studi Hubungan Internasional dan keamanan manusia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa negara Berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara. Terbukti dengan memanfaatkan upaya pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan. Namun, faktor koordinasi antarlembaga tetap menjadi momok yang perlu dibenahi. Kebutuhan sumber daya insan yang berkualitas melalui pendidikan akan sangat berguna bagi kualitas pembangunan Indonesia menuju agenda SDGs 2030.

Penelitian ini relevan dengan topik yang penulis teliti, terdapat perbedaan pada tempat penelitian dimana Adityo Darmawan Sudagung dkk meneliti di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat sedangkan penulis di Kabupaten Bekasi, kemudian pada penelitian ini hasil yang di dapatkan adalah negara sudah berupaya hadir memenuhi Pendidikan walau faktor kordinasi lintas instansi masih perlu dibenahi sedangkan penelitian penulis belum diketahui.

Rujukan ketiga, adalah jurnal yang ditulis oleh Roy Eka Pribadi pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Papua”. Jurnal tersebut memiliki volume 5 dengan nomer *issue* 3 yang merupakan eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Sampai waktu ini, Indonesia masih menghadapi hambatan besar dalam upaya menaikkan kualitas pendidikan. Hambatan ini adalah problem dana serta fasilitas, yang tidak ada hubungannya, artinya persoalan kurangnya anggaran pendidikan, kendala yang bersifat *intangible*, mirip kurangnya semangat dan impian untuk bersekolah, dan kemalasan untuk belajar, meskipun ini adalah pelengkap asal APBN. Persoalan pendidikan khususnya pendidikan di wilayah papua pada umumnya ialah salah satu yang dikira orang merupakan perkara infrastruktur, namun ternyata anggapan tadi keliru karena banyak gedung sekolah di papua. Gedung serta gedung sekolah baru telah ada pada setiap sudut Papua, begitu juga di dataran tinggi tengah Papua.

Tujuan *Sustainable Development Goals* dianggap layak atau lebih baik dari Tujuan Pembangunan *Milenium*. Tujuan *Sustainable Development Goals*

lebih bersifat global dalam kerjasama program mereka. SDGs memiliki tantangan yang sangat besar untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan di Papua, penulis melihat bahwa masalah pendidikan di Papua bukanlah masalah baru bagi pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan merupakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui telaan pustaka, baik melalui buku, jurnal, majalah, tulisan ilmiah, serta akses internet yang dievaluasi relevan menggunakan tema pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini Implementasi SDGs di Papua membentuk beberapa acara diantaranya Sekolah Satu Atap (SATAP), Sarjana Mendidik di wilayah terdepan, terluar, Tertinggal (SM3T), dan Literasi Berhitung (Calistung). program ini dilaksanakan dengan tujuan menaikkan kualitas pendidikan di Papua.

Penelitian ini relevan dengan topik yang penulis teliti. Terdapat perbedaan pada tempat penelitian, dimana Roy Eka Pribadi melakukan penelitian di Papua sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bekasi. Pada rujukan ini penulis mendapat gambaran bagaimana kualitas Pendidikan di Papua.

Rujukan keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Abd. Qadir Muslim, Gede Sedana Suci, Muhammad Rizki Pratama pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Kebijakan Pendidikan Di Jepang, Finlandia, China Dan Indonesia Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals*”. Jurnal tersebut memiliki volume 6 dengan nomor issue 2 berasal dari jurnal Pendidikan Dasar Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Darma Negeri.

Masalah kebijakan pendidikan di negara berkembang mirip Indonesia. Hal ini masih menjadi kendala seperti pemerataan, kualitas secara keseluruhan, sekolah, lingkungan belajar, atau kemampuan sistem mempersiapkan peserta didik untuk masa depan, pendanaan, manajemen yang tidak efisien, atau penilaian dan prosedur evaluasi. Kebijakan pendidikan wajib dapat mengacu di program-program yang menghipnotis sistem pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi.

Dalam perumusan kebijakan pendidikan yang diterbitkan, tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam instrumen. Pemerintah harus memilah dan memilih instrumen mana yang tepat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Namun baru-baru ini, dunia menjadi akrab dengan informasi baru yang disebut Tujuan *Sustainable Development Goals* .

Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan kerangka berpikir post-positivisme. Metode yang dipergunakan *library research*. Hasilnya beberapa negara seperti Jepang, Finlandia, China serta Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang mendukung Tujuan *Sustainable Development Goals* pendidikan yang berkualitas. Jepang telah menunjukkan kebijakan yang mendukung Tujuan *Sustainable Development Goals* dengan mewajibkan pendidikan gratis dari anak usia dini sampai pendidikan tinggi, dan Jepang pula sudah berusaha untuk meningkatkan pendidikan spesifik. Pada Finlandia, Tujuan *Sustainable Development Goals* sudah termasuk satu dari tujuh bidang prioritas kurikulum pendidikan dasar. Kebijakan pendidikan China bertujuan untuk menghubungkan aktivitas pendidikan dengan sumber daya sosial dan individu serta mempromosikan kualitas pendidikan politik. Di Indonesia, kebijakannya

artinya mempertinggi akses serta kualitas pendidikan, mempertinggi kualitas energi guru serta layanan penunjang pendidikan, menaikkan layanan pendidikan, serta memperkuat serta berbagi pembentukan kepribadian.

Penelitian yang ditulis oleh oleh Abd. Qadir Muslim, Gede Sedana Suci, Muhammad Rizki Pratama memberikan gambaran kualitas Pendidikan di negara lain diantaranya Jepang, Finlandia, dan China. Sedangkan untuk Indonesia jurnal ini hanya menjelaskan kualitas Pendidikan di Indonesia tepatnya di Wilayah Yogyakarta. Melalui rujukan ini peneliti mendapatkan gambaran bagaimana kualitas Pendidikan diberbagai negara dan wilayah lain di Indonesia.

Rujukan kelima, adalah jurnal yang ditulis oleh Siti Aisyah Nurfatihah, Syofiyah Hasna, Deti Rostika pada tahun 2022 yang berjudul “Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)”. Jurnal tersebut merupakan jurnal BASICEDU, yang memiliki volume 6 dengan nomer issue 4, Universitas Pahlawan.

Pendidikan bermutu atau berkualitas kini telah menjadi acara pemerintah yang masih terus berjalan. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun pihak lain jua ikut dan pada peningkatan mutu pendidikan, dan swasta serta lembaga pendidikan dan rakyat umum ikut serta pada pendidikan. Akibatnya, saat ini kita merasa kualitas pendidikan formal maupun informal tertinggal. Hal ini di rasakan ketika membandingkannya dengan beberapa negara lain. Pendidikan telah menjadi dasar upaya peningkatan sumber daya insan pada dunia, khususnya di Indonesia dalam pembangunan bangsa.

Metode penelitian yang digunakan merupakan kualitatif menggunakan studi literatur serta menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka yg bersumber pada jurnal serta artikel. Penelitian ini mengungkapkan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta faktor apa saja yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yg bermakna di kelas dan mempertinggi kualitas pengajaran, guru wajib menyampaikan kepemimpinan, bimbingan, dan arahan untuk memenuhi baku kualitas untuk pengembangan profesional. Disinilah perawatan pedagogis datang untuk memberikan kepemimpinan, pengawasan, dan bimbingan untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk teknik yang ideal.

Penelitian ini relevan dengan topik yang penulis teliti. Relevansinya terletak pada teori mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kondisi Pendidikan di Indonesia rendah. Melalui Rujukan ini peneliti mendapatkan gambaran mengenai upaya meningkatkan Pendidikan yang berkualitas di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi.

Rujukan keenam, adalah jurnal yang ditulis oleh Eki Lista rowati, Artha Ayu Mei Shinta, Elisa Rohimatun Nafi'ah, Sarifudin Lathif pada tahun 2020 dengan judul “Peran Pendidikan Karakter Sebagai Wujud Pendidikan Berkualitas Sesuai Dengan Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)”. Jurnal tersebut merupakan jurnal Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

Pentingnya pendidikan karakter bagi generasi belia bangsa Indonesia yang ketika ini mulai memudar, ditelan sang peradaban baru serta konflik lainnya. Pendidikan karakter *absolut* dibutuhkan sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* yaitu pendidikan yang berkualitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian teori dan kepustakaan. Dengan Mencari 30 artikel yang ditemukan di seluruh web menggunakan kata kunci *Article Character Building and Quality Education in the Sustainable Development Goals*. Artikel dari 2017-2019 terbatas, semua artikel minimal sinta 4 - sinta 1 terIndeks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka diperlukannya Pendidikan karakter kepada siswa baik dari lingkungan sekolah maupun keluarga dan masyarakat

Pada rujukan ini penulis mendapatkan gambararn tentang pentingnya Pendidikan Berkarakter terhadap kualitas Pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan SDGs. Relevansinya terdapat pada tujuan SDGs ke-4 yaitu Pendidikan berkualitas.

Rujukan ketujuh, adalah jurnal yang ditulis oleh Nur Listiawati pada tahun 2013 yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Untuk *Sustainable Development Goals* Oleh Beberapa Lembaga”. Jurnal tersebut merupakan jurnal Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud.

Menteri Lingkungan hidup Indonesia menyatakan di kesempatan Hari Lingkungan hayati Sedunia bahwa Indonesia berjuang untuk *Sustainable Development Goals* di taraf nasional, pemerintah Indonesia telah berkomitmen

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26% saja dan sebanyak 41% menggunakan dukungan internasional pada tahun 2020.

Sejalan menggunakan hal tersebut, berbagai instansi pemerintah, Badan usaha Milik Negara (BUMN), partikelir dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pendidikan telah mencoba menerapkan serta mensosialisasikan konsep keberlanjutan menggunakan banyak sekali cara. Namun, belum terdapat statistics yang secara utuh memberikan upaya forum-forum tadi untuk mengimplementasikan serta mensosialisasikan konsep *Sustainable Development Goals* .

Metode penelitian yang digunakan Metode yang digunakan adalah Pengkajian *field research* yang menggunakan pendekatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Cakupan nilai-nilai pendidikan untuk *Sustainable Development Goals (Education for sustainable development)* yang dilaksanakan dan ditanamkan di satuan pendidikan sebagian besar masih berfokus pada perspektif lingkungan dan sasaran program beragam, sebagian besar sasaran program adalah pendidik, peserta didik dan kepala sekolah; strategi penanaman nilai beragam, yaitu melalui integrasi ke dalam mata pelajaran, melalui muatan lokal, ekstrakurikuler, pembiasaan dan pembudayaan, serta kegiatan lainnya, yang paling banyak dilakukan, yaitu melalui integrasi dan pembiasaan serta pembudayaan.

Rujukan ini masih relevan dengan penelitian penulis, hanya saja di dalam rujukan ini penekanan kajiannya untuk melaksanakan dasa warsa Pendidikan untuk *Sustainable Development Goals (DESD)* dilaksanakan melalui

pengembangan berbagai acara yang salah satunya diterapkan pada satuan pendidikan oleh beberapa lembaga, baik negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta maupun forum swadaya masyarakat (LSM). Sedangkan fokus peneliti terletak pada tujuan SDGs ke-4 target ke-1 yaitu “Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif”.

Rujukan kedelapan, adalah jurnal yang ditulis oleh Winsherly Tan pada tahun 2020 yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)”. Jurnal tersebut merupakan jurnal: Jurnal Penelitian Hukum, yang memiliki volume 29 dengan nomer issue 1, Universitas Internasional Batam.

Letak geografis Kota Batam yang sangat dekat dengan mancanegara, berakibat Kota Batam memiliki tantangan tersendiri dalam memajukan pendidikan generasi muda, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Anak adalah bagian berasal generasi penerus perjuangan bangsa.

Setiap anak mempunyai hak asasi manusia. Hak Asasi insan ialah hak dasar yang ada pada insan dan tidak bisa dicabut sang siapapun selama hidupnya. Kota Batam menghadapi tantangan untuk memenuhi hak anak jalanan atas pendidikan untuk mengakses kesempatan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan gosip latar belakang pendidikan anak jalanan menurut isu berasal badan amal anak tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah *juridic empiris*. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Kota Batam belum efektif dalam melakukan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak jalanan dengan beberapa kendala yg dihadapi mirip rendahnya pengetahuan orangtua dan rendahnya perekonomian famili anak jalanan.

Rujukan ini memberikan penulis gambaran tentang bagaimana peran lembaga anak serta Kota Batam mengimplementasikan hak anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian serupa, karena dengan acuan tersebut Pemerintah Kota Batam sudah melibatkan RAD dalam implementasi tujuan SDGs tentang hak atas pendidikan. Mengenai pelaksanaan hak pendidikan anak di kota Batam masih belum optimal, karena saat ini fokus pada peningkatan akreditasi sekolah, belum pada pelaksanaan hak pendidikan anak khususnya pendidikan anak jalanan.

Rujukan kesembilan, adalah jurnal yang ditulis oleh Azeem Marhendra Amedi pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan *Sustainable Development Goals* (*Sustainable Development Goals/SDGs*)”. Jurnal tersebut merupakan jurnal *Padjajaran Law Research & Debate Society*, yang memiliki volume 6, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Kabupaten Sumedang.

Pendidikan dasar merupakan landasan terpenting untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan *Sustainable Development Goals*, yang diadopsi sang perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

sesuai akibat acara Pembangunan Majelis awam 2030 di tahun 2015, menyampaikan dasar bagi pembangunan negara-negara sebagaimana disepakati pada Tujuan *Sustainable Development Goals*. Sektor Pendidikan (Tujuan 4), yang mewajibkan Negara Anggota untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah *study literatur* berdasarkan jurnal dan penelitian terdahulu. Hasilnya artikel ini menjelaskan analisis tentang bagaimana Indonesia selama ini mengimplementasikan pendidikan dasar nasional melalui kebijakan hukum, mempertimbangkan duduk perkara pada implementasinya dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan kebijakan hukum pendidikan dasar untuk mencapai Tujuan *Sustainable Development Goals*. Tujuan *Sustainable Development Goals* bisa dicapai dengan memperbaiki kebijakan pendidikan, tentunya kebijakan hukum. Pemerintah wajib berfokus merancang kebijakan penyelenggaraan pendidikan, baik itu penetapan baku, pendanaan, pengembangan kurikulum, pengembangan fakultas, serta pengembangan karakter.

Pada rujukan ini penelitiannya lebih fokus membahas mengenai analisis Kebijakan Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia pada Era Tujuan *Sustainable Development Goals* (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sedangkan penulis lebih fokus kepada Implementasi Program *Sustainable Development Goals* perihal pendidikan berkualitas.

Rujukan kesepuluh, adalah jurnal yang ditulis oleh Barbara Bruns, Isabel Harbaugh Macdonald, Ben Ross Schneider, pada tahun 2019 yang berjudul

“Politik reformasi kualitas dan tantangan SDGs dalam Pendidikan”. Jurnal tersebut merupakan jurnal ELSEVIER dan *World Development*.

Memahami politik reformasi pendidikan sangat penting ketika menilai tantangan Tujuan *Sustainable Development Goals* dari pendidikan berkualitas. Artikel ini mengulas literatur ilmiah perihal reformasi politik skala kecil, serta beberapa studi empiris perihal awal reformasi secara luas, menggunakan penekanan pada reformasi terkini pada Amerika Latin.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mensurvei *literatur* akademis kecil tentang politik reformasi serta berbagai penelitian empiris tentang pengalaman reformasi di seluruh dunia, dengan penekanan pada reformasi baru-baru ini di Amerika Latin. Hasil dari penelitian ini reformasi kebijakan guru, yang memainkan peran sentral dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah, tetapi menimbulkan tiga tantangan khusus. Pertama, mereka kontroversial, seringkali mengancam kepentingan institusi serikat guru yang terorganisir dengan baik dan kuat secara politik. Kedua, implementasinya tidak jelas, karena dampaknya tergantung pada perubahan tingkat kelas yang sulit dipantau oleh para reformis. Ketiga, manfaatnya bersifat jangka panjang, biasanya jauh melampaui masa jabatan politik para pendukung reformasi. Tinjauan mendalam terhadap semua pemangku kepentingan utama termasuk serikat guru, bisnis, LSM, otoritas agama, lembaga pembangunan internasional, dan lainnya merupakan langkah awal yang penting untuk memahami potensi sumber oposisi dan dukungan. Isu-isu strategis dalam desain dan implementasi kebijakan

meliputi: konsultasi, pengurutan, kompensasi, negosiasi, komunikasi, dan reformasi berkelanjutan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang penulis teliti. Akan tetapi, lokasi penelitian dilakukan di Clifornia Amerika Serikat, sedangkan penulis melakukan penelitian di Indonesia. Pada rujukan ini penelitiannya lebih fokus membahas mengenai Politik reformasi terhadap kualitas dan tantangan SDGs dalam Pendidikan.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas mengenai implementasi *Sustainable Development Goals* di satu daerah (Adityo Darmawan Sudagung et al. (2019); Winsherly Tan (2020); Roy Eka Pribadi (2015)). Beberapa mengkaji sudut pandang keilmuan yang berbeda (Azeem Marhendra Amedi (2018); Barbara Bruns (2019); Vasiliki Kioupi and Nikolaos Voulvoulis (2020)). Berdasarkan konsep suatu lembaga (Nur Listiawati (2013)). Dan pada beberapa penelitian fokus kajiannya secara general yaitu negara, diantaranya (Siti Aisyah Nurfatimah et al. (2022); Alvira Oktavia Safitri et al.(2022); Eki Lista Anggorowati et al. (2020) ; Abd. Qadir Muslim et al. (2021); Syubhan Annur et al. (2018)).

Kajian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, yang lebih fokus melakukan kajian hanya pada sudut pandang pada satu tempat dan pada kualitas Pendidikan, ataupun pada penerapan kebijakannya saja. Peneliti pun belum menemukan penelitian yang membahas persepsi guru terkait implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi).

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, diantaranya pada kajian Pengembangan dan Inovasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Sistem Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Publik, dan Manajemen Kinerja dengan melalui Implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dan berguna sebagai rujukan untuk penelitian sejenis yang berhubungan dengan teori-teori yang ada. Sesuai dengan kenyataan di lokasi obyek penelitian.

1.5 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan mendalam bagi peneliti terkait Implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi).

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahkan pertimbangan bagi Pemerintah di Kabupaten Bekasi khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dinas Pendidikan dalam pengimplementasian *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi).

3. Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi dan dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap kualitas Pendidikan di Kabupaten Bekasi. Dengan kajian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas kepada setiap masyarakat tentang bagaimana Implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi mengenai Implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi), peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan signifikansi praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai kerangka teori dengan menguraikan teori yang berkaitan dengan pembahasan Implementasi *Sustainable Development Goals* Ke-4 Target Ke-1 (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bekasi), dalam bab ini juga menguraikan kerangka berpikir serta asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian metodologi penelitian yang merupakan dasar penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu data yang dapat diperoleh seperti: Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Perekrutan *Informan*, Teknik Analisis Data, *Goodness and Quality Criteria* penelitian, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian dan Keterbatasan Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yang menggambarkan tentang deskriptif data serta analisis data dengan prosedur pengumpulan data dan pengolahannya.

BAB V KESIMPULAN

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran serta daftar pustaka.